



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 10);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 02);
42. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 64);
43. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 164 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 90);
44. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I, mengatur mengenai pendahuluan;
 - b. bab II, mengatur mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III, mengatur mengenai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV, mengatur mengenai rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V, mengatur mengenai penutup.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Agustus 2025



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan wajib menyusun perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional dan daerah yang bersifat terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan organisasi perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Renja PD disusun berdasarkan dokumen Renstra PD dan diselaraskan dengan RKPD, serta berfungsi untuk menjabarkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terukur.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Ngawi memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Pelaksanaan tugas ini diarahkan untuk mendukung

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;

35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Seri D); Jawa Timur Tahun 2023
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 02);

43. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 64);
44. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 159 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 85 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 85);
45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 40);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Memberikan arahan dan acuan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan sehingga selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah.
2. Menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan Renja dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Ngawi 2026.
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam perencanaan kinerja tahunan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
2. Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
4. Menjaga kesinambungan antara dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kebijakan, dan sub kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.
4. Tabel rencana program/kegiatan/sub kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pemerintah Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja adalah salah satu fungsi yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas instansi pemerintah yang didalamnya memuat target, capaian, program, dan kegiatan. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2024 dan serta capaian Renstra s.d. 2025. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sebagai pertimbangan penyusunan program/kegiatan pada periode berikutnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan telah dapat direalisasikan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja 2024 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 2021-2026.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra sampai dengan triwulan II Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun (2025)
Kabupaten Ngawi

Nama Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD s.d. Tahun 2025 (Akhir Periode)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025									
			100	%	100	%	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1	2	3	4		5			6			7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00%	100	%	100	%	100,00%		
2	12	01	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100	%	98,22	%	100	%	100	%	100,00%	100	%	99	%	99,41%	
2	12	01	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	100,00%	9	Dokumen	27	Dokumen	100,00%
					Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang Disusun	20	Dokumen	9	Dokumen	-	-	-	-	-	-	9	Dokumen	45,00%		
					Jumlah Dokumen Penganggaran yang disusun	8	Dokumen	5	Dokumen	-	-	-	-	-	-	5	Dokumen	62,50%		
2	12	01	02.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	3	Dokumen	100,00%
					Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang Disusun Tepat Waktu	5	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	12	01	02.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	1	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	1	Dokumen	33,33%		
2	12	01	02.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	5	Dokumen	83,33%
2	12	01	02.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	6	Dokumen	100,00%
2	12	01	02.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun tepat waktu	8	Dokumen	5	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	5	Dokumen	62,50%		
2	12	01	02.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	Dokumen	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00%	7	Dokumen	26	Dokumen	81,25%
2	12	01	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00%	100	%	100	%	100,00%	
2	12	01	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	130	Dokumen	78	Dokumen	26	Dokumen	26	Dokumen	100,00%	26	Dokumen	130	Dokumen	100,00%	
					Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	8.840	Kali	2210	Kali	1.872	Kali	1872	Kali	100,00%	1.872	Kali	5.954	Kali	67,35%	
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	3	Dokumen	100,00%
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	3	Dokumen	2	Dokumen	-	-	-	-	-	-	2	Dokumen	66,67%		
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang Disusun	206	Dokumen	62	Dokumen	-	-	-	-	-	62	Dokumen	30,10%		
					Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Disusun	10	Dokumen	4	Dokumen	-	-	-	-	-	-	4	Dokumen	40,00%		

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun (2025)
Kabupaten Ngawi

Nama Organisasi : DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD s.d. Tahun 2025 (Akhir Periode)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025							
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/7)	11=(10/4)										
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/7)	11=(10/4)	12	13	14	15						
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawalannya dalam setahun	100	%	100	%	100	%	100,00%	100	%	100	%	100,00%		
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya	4	Paket	-		2	Paket	2	Paket	100,00%	2	Paket	4	Paket	100,00%
						Jumlah Paket Pakaiannya	235	Meter	-		-		-		-		-		-	
						Jumlah Pakaiannya	96	Stel	-		-		-		-		-		-	
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi dengan Kategori Paham	420	Peserta	-		-		-	120	Peserta	120	Peserta	28,57%		
2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	170	Peserta	70	Peserta	-		-	-		70	Peserta	41,18%		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	320	Orang	-		30	Orang	30	Orang	100,00%	120	Orang	150	Orang	46,88%
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100	%	98,773	%	100	%	100,00%	100	%	100	%	99,59%		
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00%	1	Paket	4	Paket	133,33%
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi/Penerangan	100	%	99,995	%	-		-	-		100	%	100,00%		
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00%	3	Paket	7	Paket	100,00%
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	97,5	%	-		-	-		98	%	97,50%		
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	1	Paket	4	Paket	4	Paket	100,00%	4	Paket	9	Paket	300,00%
						Jumlah Makanan yang Disediakan	911	Kotak	920	Kotak	-		-	-		920	Kotak	100,99%		
						Jumlah Minuman yang Disediakan	500	Botol	920	Botol	-		-	-		920	Botol	184,00%		
						Jumlah Air Isi Ulang yang Disediakan	96	Galon	92	Galon	-		-	-		92	Galon	95,83%		
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100,00%	12	Paket	36	Paket	100,00%
						Jumlah Barang yang Dicitak	6.104	Lembar	3478	Lembar	-		-	-		3.478	Lembar	56,98%		
						Jumlah Barang yang Digandakan	4.100	Lembar	2401	Lembar	-		-	-		2.401	Lembar	58,56%		
						Jumlah Iklan/Publikasi/Media Cetak	25	Kali	45	Kali	-		-	-		45	Kali	180,00%		
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	125	Eksemplar	98	Eksemplar	-		-	-		98	Eksemplar	78,40%		
						Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	48	Majalah	47	Majalah	-		-	-		47	Majalah	97,92%		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	108	Dokumen	111	Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	100,00%	36	Dokumen	183	Dokumen	169,44%
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	Laporan	6	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00%	4	Laporan	14	Laporan	77,78%
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217	Laporan	12	Laporan	50	Laporan	50	Laporan	100,00%	12	Laporan	74	Laporan	34,10%
						Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang Dihadiri/Dikuti	58	Kali	43	Kali	-		-	-		43	Kali	74,14%		
						Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang Dihadiri/Dikuti	40	Kali	41	Kali	-		-	-		41	Kali	102,50%		

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun (2025)
Kabupaten Ngawi

Nama Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD s.d. Tahun 2025 (Akhir Periode)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4)					
			4	5	6	7	8	9	10=(6+7+9)		11=(10/4)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat SKPD yang Disediakan	450	Kotak	-	-	200	Kotak	200	Kotak	100,00%	90	Kotak	290	Kotak	64,44%				
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam setahun	100	%	100	%	100,00%	100	%	100	%	100,00%				
2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang diadakan	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	170	Paket	60	Paket	1	Unit	1	Unit	100,00%	-	61	Paket	35,88%	
						Jumlah meubelair yang diadakan	39	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68	Unit	-	-	13	Unit	13	Unit	100,00%	8	21	Unit	30,88%	
						Jumlah Peralatan Kantor yang Diadakan	12	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	8	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100	%	91,4	%	100,00%	100	%	97	%	97,13%				
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	36	Laporan	100,00%
						Jumlah Surat yang Dikirim	1.100	Surat	892	Surat	-	-	-	-	-	892	Surat	81,09%		
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216	Laporan	72	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	100,00%	72	Laporan	180	Laporan	83,33%
						Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	15	Kali	-	-	5	Kali	5	Kali	100,00%	21	Kali	26	Kali	173,33%
						Jumlah rekening air yang dibayar	24	Rekening	23	Rekening	-	-	-	-	-	23	Rekening	95,83%		
						Jumlah rekening listrik yang dibayar	528	Rekening	503	Rekening	-	-	-	-	-	503	Rekening	95,27%		
						Jumlah rekening telepon yang dibayar	120	Rekening	115	Rekening	-	-	-	-	-	115	Rekening	95,83%		
						Jumlah internet yang dibayar	6	Paket	3	Paket	-	-	-	-	-	3	Paket	50,00%		
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	144	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	100,00%	48	Laporan	144	Laporan	100,00%
						Jumlah alat kebersihan yang dibeli	261	Buah	252	Buah	-	-	-	-	-	252	Buah	96,55%		
						Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	56	Buah	47	Buah	-	-	-	-	-	47	Buah	83,93%		
						Jumlah pembayaran jasa kebersihan	1	Kali	2	Kali	-	-	-	-	-	2	Kali	200,00%		
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	252	Laporan	84	Laporan	60	Laporan	60	Laporan	100,00%	72	Laporan	216	Laporan	85,71%
						Jumlah Pembayaran Honor	252	Kali	161	Kali	-	-	-	-	-	161	Kali	63,89%		
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100	%	98,867	%	100,00%	100	%	100	%	99,62%				

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun (2025)
Kabupaten Ngawi

Nama Organisasi : DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD s.d. Tahun 2025 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025								
1				2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	Unit	3	Unit	1	Unit	100,00%	4	Unit	8	Unit	160,00%		
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan	4	Kali	3	Kali	-	-	-	-	-	-	3	Kali	75,00%		
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	6	Unit	3	Unit	100,00%	9	Unit	18	Unit	200,00%		
					Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6	Unit	6	Unit	-	-	-	-	-	-	6	Unit	100,00%		
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	6	Unit	5	Unit	-	-	-	-	-	-	5	Unit	83,33%		
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan meubelair	1	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	Kali	-		
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	110	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unit	-	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	230	Unit	65	Unit	45	Unit	100,00%	35	Unit	145	Unit	63,04%		
					Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	71	Kali	68	Kali	-	-	-	-	-	-	68	Kali	95,77%		
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	-	-	-	-	-	1	Unit	1	Unit	12,50%		
					Luasan gedung kantor yang dipelihara	900	Meter	400	Unit	-	-	-	-	-	-	400	Meter	44,44%		
2	12	01	2.10	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	89	Unit	39	Unit	-	-	-	-	-	39	Unit	43,82%		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	152	Unit	22	Unit	-	-	-	-	-	-	22	Unit	14,47%		
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk dengan dokumen kependudukan	79,00	%	-	-	84	%	87,01	%	103,58%	89	%	88	%	111,40%
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan yang Terdata	42,50	%	-	-	45	%	44	%	97,78%	45	%	45	%	104,71%
					Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian permasalahan kependudukan	82,50	%	-	-	85	%	100	%	117,65%	85	%	93	%	112,12%	
					Persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan dan sesuai dengan standart pelayanan	82,50	%	-	-	85	%	100	%	117,65%	85	%	93	%	112,12%	
					Jumlah KTP yang dicetak	145.000	KTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah KK yang dicetak	123.000	KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah KIA yang dicetak	68.000	KIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah perekaman KTP	32.000	Perekaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah penduduk non permanen yang terdata	310	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah penduduk WNA yang didata	365	WNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah penduduk pindah datang yang tervifikasi	24.500	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Persentase Perekaman KTP elektronik	98.967	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	90	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Persentase KTP elektronik Yang tercetak	95	%	103,33	%	-	-	-	-	-	-	103	%	108,77%		

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun (2025)
Kabupaten Ngawi

Nama Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD s.d. Tahun 2025 (Akhir Periode)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025									
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)											
		Persentase KK yang tercetak	96	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Persentase penduduk permanen yang terdata	95	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Persentase penduduk WNA yang terdata	95	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Persentase penduduk pindah datang yang difasilitasi	97	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	4	Dokumen	133,33%	
					Jumlah koordinasi dengan desa yang memiliki penduduk rentan	10	Kali	5	Kali	-	-	-	-	-	-	-	5	Kali	50,00%		
					Jumlah koordinasi dengan pemilik rumah sewa dan pemerintah desa	20	Kali	10	Kali	-	-	-	-	-	-	-	10	Kali	50,00%		
					Jumlah koordinasi dengan instansi terkait penduduk WNA	6	Kali	3	Kali	-	-	-	-	-	-	-	3	Kali	50,00%		
2	12	01	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah koordinasi dengan lintas sektor	10	Kali	5	Kali	-	-	-	-	-	-	5	Kali	50,00%		
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi regulasi pendaftaran penduduk	300	Orang	200	Orang	-	-	-	-	-	-	-	200	Orang	66,67%		
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	750	Orang	200	Orang	50	Orang	50	Orang	100,00%	35	Orang	285	Orang	38,00%		
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	22	Laporan	5	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00%	12	Laporan	24	Laporan	109,09%	
					Jumlah SDM operator adminduk yang direkrut	12	Orang	6	Orang	-	-	-	-	-	-	-	6	Orang	50,00%		
					Jumlah operator peserta bimtek	100	Orang	100	Orang	-	-	-	-	-	-	-	100	Orang	100,00%		
					Jumlah petugas registra desa yang mengikuti pelatihan layanan pendaftaran penduduk	25	Orang	25	Orang	-	-	-	-	-	-	-	25	Orang	100,00%		
					Jumlah desa yang dimonitoring	434	Desa	217	Desa	-	-	-	-	-	-	-	217	Desa	50,00%		
					Jumlah sarana prasarana layanan adminduk keliling yang diadakan	4	Paket	2	Paket	-	-	-	-	-	-	-	2	Paket	50,00%		
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00%	100	%	100	%	100,00%	
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko pendaftaran penduduk yang disediakan	2.000	Lembar	3000	Lembar	-	-	-	-	-	-	3.000	Lembar	150,00%		
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	150.000	Dokumen	60	Dokumen	210	Dokumen	210	Dokumen	100,00%	1.000	Dokumen	1.270	Dokumen	0,85%		
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase sosialisasi pelayanan pendaftaran penduduk	100,00	%	100	%	-	-	-	-	-	-	100	%	100	%	100,00%
					Persentase Peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75	76,50	%	-	-	79	%	80	%	101,27%	79	%	80	%	103,92%		
					Persentase lokasi fokus yang terlayani oleh layanan secara aktif pelayanan administrasi kependudukan	45,00	%	-	-	50	%	46	%	92,00%	50	%	48	%	106,67%		

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun (2025)
Kabupaten Ngawi

Nama Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD s.d. Tahun 2025 (Akhir Periode)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025					
							4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	12	02	203	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	48	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00%	24	Dokumen	48	Dokumen	100,00%	
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	20	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	2	Laporan	9	Laporan	45,00%	
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pelayanan pendaftaran penduduk	150	Orang	150	Orang	-	-	-	-	-	-	150	Orang	100,00%		
						Jumlah publikasi layanan pendaftaran penduduk	2	Kali	2	Kali	-	-	-	-	-	-	2	Kali	100,00%		
						Jumlah koordinasi intensif dengan Kecamatan, Pemerintah Desa yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	4	Kali	4	Kali	-	-	-	-	-	-	4	Kali	100,00%		
						Jumlah sarpras layanan dokumen kependudukan yang diadakan	3	Kali	3	Kali	-	-	-	-	-	-	3	Kali	100,00%		
						Jumlah pemeliharaan sarpras layanan dokumen kependudukan	2	Kali	2	Kali	-	-	-	-	-	-	2	Kali	100,00%		
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	80,00	%	-	%	-	%	-	%	85	%	85	%	106,25%		
2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	4	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	Laporan	1	Laporan	25,00%	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk dengan akta pencatatan sipil	83,00	%	100	%	89	%	99,51	%	111,81%	93	%	98	%	117,47%	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	82,50	%	-	%	100	%	100	%	100,00%	85	%	93	%	112,12%	
						Persentase capaian akta kelahiran usia 0-18 tahun	93,50	%	-	%	92	%	99	%	107,61%	95	%	97	%	103,74%	
						Persentase capaian Penerbitan akta kematian	77,50	%	-	%	-	%	-	%	-	80	%	80	%	103,23%	
						Jumlah Akta kelahiran yang dicetak	27.000	Akta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Akta perkawinan yang di cetak	90	Akta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Akta perceraian yang dicetak	35	Akta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 - 17 tahun	100	%	-	%	-	%	-	%	-	-	-	-	-	-	
						Persentase Penerbitan akta perkawinan	100	%	-	%	-	%	-	%	-	-	-	-	-	-	
						Persentase Penerbitan akta perceraian	100	%	-	%	-	%	-	%	-	-	-	-	-	-	
						Persentase Akta kelahiran yang tercetak	100	%	100	%	-	%	-	%	-	-	100	%	100	%	100,00%
						Persentase Akta perkawinan yang tercetak	100	%	-	%	-	%	-	%	-	-	-	-	-	-	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	15	Dokumen	4	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00%	6	Dokumen	15	Dokumen	100,00%	
						Jumlah register yang dicetak	18.570	Register	18570	Register	-	-	-	-	-	-	18.570	Register	100,00%		
						Jumlah operator cetak register dan kutipan akta pencatatan yang direkrut	3	Orang	6	Orang	-	-	-	-	-	-	6	Orang	200,00%		
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	17	Layanan	5	Layanan	5	Layanan	5	Layanan	100,00%	6	Layanan	16	Layanan	94,12%	

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun (2025)
Kabupaten Ngawi

Nama Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD s.d. Tahun 2025 (Akhir Periode)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025								
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)										
		Persentase Data dan informasi kependudukan yang valid	98,00	%	-		100	%	100	%	100,00%	99	%	100	%	101,53%				
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase dokumen kerjasama yang terselesaikan dan terlaksana oleh lembaga pengguna dalam setahun	55,00	%	-		90	%	100	%	111,11%	60	%	80	%	145,45%
					Persentase pemenuhan laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	100,00	%	-		90	%	100	%	111,11%	100	%	100	%	100,00%	
					Jumlah data ganda yang di nonaktifkan	3.800	Data	200	Data	-	-	-	400	Data	600	Data	15,79%			
					Jumlah Buku Agregat yang di terbitkan	12	Buku	-		-	-	-	-		-	Buku	-			
					Jumlah perjanjian kerjasama yang di tandatangi dengan lembaga pengguna	150	PKS	50	PKS	-	-	-	-		50	PKS	33,33%			
					Persentase arsip yang tertata sesuai standar kearsipan	100	%	-		-	-	-	-		-	%	-			
					Jumlah Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 Tahun	36	%	-		-	-	-	-		-	%	-			
					Persentase data ganda yang di nonaktifkan	75	%	100	%	-	-	-	-		100	%	133,33%			
					Persentase arsip yang tertata sesuai standar kearsipan	75	%	-		-	-	-	-		-	%	-			
					Persentase Buku Agregat yang diterbitkan	100	%	-		-	-	-	-		-	%	-			
					Persentase perjanjian kerjasama yang di tandatangi dengan lembaga pengguna	90	%	152,17	%	-	-	-	-		152	%	169,08%			
					Persentase Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 Tahun	100	%	-		-	-	-	-		-	%	-			
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data agregat per semester yang diolah	28	Data	28	Data	-	-	-	28	Data	100,00%				
						Jumlah penyajian data agregat di website	2	Kali	2	Kali	-	-	-	2	Kali	100,00%				
						Jumlah permintaan data yang dicukupi	120	Data	120	Data	-	-	-	120	Data	100,00%				
						Jumlah laporan data kependudukan perbulan yang disusun	6	Laporan	6	Laporan	-	-	-	6	Laporan	100,00%				
						Jumlah konten terkait pelayanan adminduk yang di upload	12	Kali	12	Kali	-	-	-	12	Kali	100,00%				
						Jumlah data perkembangan penduduk yang disusun perbulan	12	Data	12	Data	-	-	-	12	Data	100,00%				
2	12	04	2.01	0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	50	Dokumen	25	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00%	6	Dokumen	41	Dokumen	82,00%
						Jumlah Perjanjian kerjasama yang disusun	100	PKS	50	PKS	-	-	-	50	PKS	50,00%				
						Jumlah monitoring perjanjian kerjasama OPD dan Pemdes yang dilaksanakan	1	Kali	1	Kali	-	-	-	1	Kali	100,00%				
						Jumlah pembaruan kerjasama	17	Kerjasama	17	Kerjasama	-	-	-	17	Kerjasama	100,00%				
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	29	Laporan	7	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100,00%	12	Laporan	29	Laporan	100,00%
						Jumlah arsip yang tertata sesuai standar kearsipan	20.000	Arsip	-		-	-	-	-		-		-		
						Jumlah operator arsip yang mengikuti bimtek pengelolaan arsip pencatatan sipil	3	Operator	-		-	-	-	-		-		-		
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Gangguan Jaringan Yang di tangani kurang dari 2x24 Jam	100	%	100	%	-	-	-	100	%	100	%	100	%	100,00%

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun (2025)
Kabupaten Ngawi

Nama Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD s.d. Tahun 2025 (Akhir Periode)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025								
			100	%	-	-	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)	100	%	100=(6+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam setahun	100	%	-	-	100	%	100,00%	100	%	100	%	100,00%						
		Persentase Pemenuhan Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	100	%	-	-	100	%	100,00%	100	%	100	%	100,00%						
		Jumlah perangkat SIAK yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	19	Perangkat	-	-	-	-	-	19	Perangkat	19	Perangkat	100,00%						
		Jumlah inovasi pelayanan yang di kembangkan	4	Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Jumlah hak akses data kependudukan yang diberikan kepada lembaga pengguna	280	Hak Akses	-	-	-	-	-	80	Hak Akses	80	Hak Akses	28,57%						
		Persentase pemanfaatan data kependudukan	66	%	-	-	-	-	-	96	%	96	%	145,45%						
2	12	04	2.03	0003	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	42	Laporan	12	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	100,00%	12	Laporan	38	Laporan	90,48%
					Jumlah monitoring evaluasi aplikasi dan jaringan yang dilaksanakan	76	Kali	76	Kali	-	-	-	-	-	76	Kali	100,00%			
					Jumlah SOP yang di review	20	SOP	10	SOP	-	-	-	-	-	10	SOP	50,00%			
					Jumlah koordinasi pengelolaan informasi adminduk internal dan eksternal yang dilaksanakan	40	Kali	40	Kali	-	-	-	-	-	40	Kali	100,00%			
					Jumlah kendala teknis pengelolaan informasi adminduk yang diperbaiki	107	Kali	107	Kali	-	-	-	-	-	107	Kali	100,00%			
					Jumlah client yang di install ulang	43	Perangkat	24	Perangkat	-	-	-	-	-	24	Perangkat	55,81%			
2	12	01	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah koordinasi intensif terkait pemanfaatan data kependudukan di OPD dan Pemdeds	6	Kali	3	Kali	-	-	-	-	3	Kali	50,00%			
					Jumlah monitoring pemanfaatan data kependudukan di OPD dan Pemdeds	6	Kali	3	Kali	-	-	-	-	-	3	Kali	50,00%			
					Jumlah koordinasi dengan Pusat terkait Pemanfaatan data yang dilaksanakan	6	Kali	3	Kali	-	-	-	-	-	3	Kali	50,00%			
					Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan	400	Orang	300	Orang	-	-	-	-	-	300	Orang	75,00%			
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pendataan awal capaian dokumen hasil pelayanan adminduk	2	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah pengkajian pengembangan inovasi pelayanan adminduk	2	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah monitoring keefektifan dan manfaat pelaksanaan inovasi yang dikembangkan	2	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah evaluasi efektivitas pelaksanaan inovasi yang dikembangkan	2	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah koordinasi dengan pengguna inovasi terhadap efektivitas dan efisiensi inovasi pelayanan yang di kembangkan	2	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	64	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	16	Dokumen	25,00%
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peserta Bimtek TIK yang mendapatkan nilai minimal 75	78	%	100	%	100	%	90	%	90,00%	82	%	91	%	116,24%

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun (2025)
Kabupaten Ngawi

Nama Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD s.d. Tahun 2025 (Akhir Periode)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				
1					2	3	4		5		6			7		8=(7/6)				
1					2	3	4		5		6			7		8=(7/6)				
1					2	3	4		5		6			7		8=(7/6)				
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	6	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00%	1	Laporan	5	Laporan	83,33%
						Jumlah peserta yang mengikuti bimtek implementasi SIAK update terbaru	300	Orang	200	Orang	-	-	-	-	-	-	-	200	Orang	66,67%
						Jumlah pengaduan yang dievaluasi (tidak lanjut)	360	Pengaduan	360	Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-	360	Pengaduan	100,00%
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kelengkapan Data Profil	87,50	%	100	%	90	%	90	%	100,00%	90	%	93	%	106,67%
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah jenis data yang disajikan	177	Data	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Persentase Pemenuhan Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain dalam setahun	100,00	%	-	-	100	%	100	%	100,00%	100	%	100	%	100,00%
						Persentase Pemenuhan Data Kependudukan Kabupaten/Kota dalam setahun secara digital	52,50	%	-	-	100	%	100	%	100,00%	55	%	78	%	147,62%
						Persentase jenis data yang disajikan	70,00	%	100	%	-	-	-	-	-	-	-	100	%	142,86%
						Jumlah inovasi pelayanan yang dikembangkan	4	Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12	Dokumen	6	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00%	4	Dokumen	14	Dokumen	116,67%
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	5	Dokumen	83,33%
						Jumlah buku profil kependudukan yang disusun	2	Buku	1	Buku	-	-	-	-	-	-	-	1	Buku	50,00%
						Jumlah Koordinasi profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan dengan lintas sektor yang dilaksanakan	6	Kali	6	Kali	-	-	-	-	-	-	-	6	Kali	100,00%
						Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	150	orang	150	orang	-	-	-	-	-	-	-	150	Kali	100,00%

Dari tabel 2.1. tersebut diatas, dapat dijelaskan realisasi capaian Renja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan

a. Program

Secara umum, semua program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dapat terealisasi dengan baik dan telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan.

b. Kegiatan

1) Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk

Indikator persentase penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan yang terdata dengan capaian kinerja 97,78% (Target 45%, realisasi 44%).

2) Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

Indikator persentase lokasi fokus yang terlayani oleh layanan secara aktif pelayanan administrasi kependudukan dengan tingkat capaian kinerja 92% (Target 50%, realisasi 46%).

3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Indikator kegiatan peserta bimtek TIK yang mendapatkan nilai minimal 75 dengan tingkat capaian 90% (Target 100%, realisasi 90%)

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan

a. Program

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

b. Kegiatan

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4) Penataan Pendaftaran Penduduk
 - 5) Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 6) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 7) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 8) Penyusunan Profil Kependudukan
3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan
- a. Program
 - 1) Program Pendaftaran Penduduk

Indikator persentase penduduk dengan dokumen kependudukan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,58% (Target 84%, realisasi 87,01%).
 - 2) Program Pencatatan Sipil

Indikator persentase penduduk dengan akta pencatatan sipil dengan capaian kinerja sebesar 111,81% (Target 89%, realisasi 99,51%).
 - b. Kegiatan
 - 1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Indikator persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian permasalahan kependudukan dengan tingkat capaian 117,65% (Target 85%, realisasi 100%).
 - Indikator persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan dan sesuai dengan standar pelayanan dengan tingkat capaian 117,65% (Target 85%, realisasi 100%).
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - Indikator persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75 dengan tingkat capaian 101,27% (Target 79%, realisasi 80%).

- 3) Kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil dengan rerata capaian kinerja 111,11%.
- 4) Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dengan capaian kinerja 111,11%.

Adapun pencapaian renstra 2021-2026 hingga triwulan II tahun 2025 sebagian besar program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dapat tercapai dan bahkan melampaui target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program menunjukkan persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun terealisasi dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan dukungan internal perangkat daerah dari segi perencanaan, keuangan, administrasi, kepegawaian, maupun sarana prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Indikator program menunjukkan persentase penduduk dengan dokumen kependudukan terus meningkat setiap tahun selama lima tahun terakhir. Hingga tahun 2025, realisasi diperkirakan mencapai 88%, melampaui target awal sebesar 79% dengan tingkat pencapaian 111,40%.

3. Program Pencatatan Sipil

Indikator program menunjukkan bahwa persentase penduduk yang memiliki akta pencatatan sipil terus mengalami peningkatan setiap tahun selama lima tahun terakhir. Hingga tahun 2025, realisasi diperkirakan mencapai 99,51%, melampaui target akhir Renstra sebesar 84,67% atau setara dengan tingkat pencapaian 117,47%.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator program menunjukkan bahwa kinerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) telah berjalan dengan

baik. Persentase validitas data dan informasi kependudukan mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan seluruh aplikasi SIAK berfungsi normal sepanjang tahun.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Indikator program menunjukkan bahwa capaian program Pengelolaan Profil Kependudukan terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hingga tahun 2025, kelengkapan data profil kependudukan mencapai 93%, melampaui target sebesar 87,5% atau setara dengan tingkat pencapaian 106,29%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara capaian kinerja dengan target indikator sasaran serta dampak yang ditimbulkan. Melalui pengkajian ini, dapat diidentifikasi permasalahan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sebagai dasar penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan berikutnya. Selanjutnya, pembahasan evaluasi dan analisis kinerja kegiatan pada bagian ini akan didasarkan pada indikator kinerja berdasarkan penetapan perjanjian kinerja tahun 2024.

Dalam penyusunan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, digunakan indikator kinerja utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah dengan indikator Hasil LHE AKIP Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis), dengan indikator:
 - a. Rata-rata persentase capaian adminduk
 - b. Persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang memanfaatkan data kependudukan

Hasil evaluasi terhadap kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tahun 2024 menunjukkan bahwa ketiga indikator utama tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Adapun Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			89,35	89,40	89,45	89,47	89,35	89,60	89,61	89,62	-
2	Rata-Rata Persentase Capaian Adminduk			87,00%	91,00%	96,00%	N/A	92,00%	-	-	-	
3	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang Memanfaatkan Data Kependudukan			72,00%	75,00%	80,00%	N/A	98,00%	-	-	-	
4	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan			-	96,25	96,5	96,75	-	-	96,5	96,75	Renstra 2025-2029
5	Meningkatnya cakupan pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pengguna dalam mendukung pelayanan publik			-	70,00%	75,00%	80%	-	-	75,00%	80%	
6			Persentase Perekaman KTP Elektronik	-	-	-	-	99,13%	-	-	-	IKK Outcome sesuai Permendagri 18 Tahun 2020
7			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-	-	-	-	61,34%	-	-	-	
8			Persentase Kepemilikan akta kelahiran	-	-	-	-	99,00%	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
9			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-	-	-	-	85,19%	-	-	-	
10			Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	Renstra 2025-2029
11			Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
12			Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
13			Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	-	99,05%	99,10%	99,20%	-	-	99,10%	99,20%	
14			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-	65%	70%	75%	-	-	70%	75%	
15			Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun.	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
16			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	-	3%	4%	5%	-	-	4%	5	

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja diatas dapat dijabarkan analisis dan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

a. Indikator: Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah 2024 mendapatkan nilai 89,35 yang terinci dalam beberapa komponen penilaian yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja dengan Nilai : 27,60
- 2) Pengukuran Kinerja dengan nilai : 27,00
- 3) Pelaporan Kinerja dengan Nilai : 13,50
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan Nilai : 21,25

Dengan target yang sama, tingkat ketercapaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan memiliki sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
- 2) Adanya mekanisme untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan perbaikan berkelanjutan.
- 3) Pemanfaatan anggaran, tenaga kerja, dan waktu secara optimal.
- 4) Komitmen pimpinan dalam menjalankan sistem akuntabilitas kinerja.

2. Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, dan Gratis)

a. Indikator: Rata-rata persentase capaian adminduk dengan target 87% terealisasi sebesar 92%. Dengan demikian, tingkat pencapaian target indikator adalah sebesar 106%. Capaian tersebut menggambarkan kinerja yang semakin baik karena realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Data capaian tersebut diperoleh dari rata-rata data capaian pelayanan administrasi kependudukan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan

No	Uraian	Capaian
1	Persentase penerbitan kartu keluarga	100%
2	Persentase capaian KTP elektronik	99,54%
3	Persentase capaian Kartu Identitas Anak (KIA)	61,48 %
4	Persentase capaian akta kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun	99,02 %
5	Persentase capaian akta kematian	100%

Sumber: Data Kependudukan Bersih 31 Desember 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Koordinasi dengan desa terkait pemenuhan perekaman KTP-el melalui jalur undangan bagi warga usia wajib KTP, dengan capaian 5.000 undangan di 130 desa se-Kabupaten Ngawi.
- 2) Kolaborasi lintas sektor dengan memberikan Pelayanan adminduk pada event publik seperti Pasar Djadoel, *Car Free Day*, Ahad Pahingan, dan agenda Pemkab Ngawi.
- 3) Penyederhanaan standar pelayanan dengan menerbitkan SK Kepala Dinas Nomor: 400.12/305/404.311/2024 tentang standar pelayanan untuk memudahkan pengurusan dokumen dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
- 4) Dukungan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yaitu:
 - a) Bu Karina Cekatan, yaitu inovasi layanan pencetakan Kartu Keluarga, KTP-el, dan KIA yang dilaksanakan di 19 kecamatan, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat sehingga proses pencetakan cukup dilakukan di kecamatan tanpa harus ke kantor Disdukcapil.

- b) Jempol Permadani, yaitu inovasi jemput bola pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, warga miskin, lansia, dan mereka yang mengalami keterbatasan akses. Program ini juga diharapkan mampu mendukung pengurangan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban biaya transportasi dan akses pelayanan.
 - c) Identitas Kependudukan Digital (IKD), yaitu transformasi digital administrasi kependudukan yang dicanangkan oleh Ditjen Dukcapil sebagai upaya modernisasi layanan dan peningkatan kemudahan akses data kependudukan secara daring.
 - d) Mal Pelayanan Publik, yang menyediakan layanan terpadu lintas sektor dengan prinsip kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam satu tempat.
- b. Indikator: Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan dengan target capaian adalah 72% dan terealisasi sebesar 98% serta tingkat ketercapaian terhadap target sebesar 136%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung berikut ini:
- 1) Adanya Perbup Ngawi No. 45 Tahun 2022 tentang penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan. Perbup tersebut mendukung dilaksanakannya inovasi "Paduka Dewi" yaitu pelayanan adminduk di 213 desa dan 4 kelurahan, untuk mempermudah akses layanan KK dan akta pencatatan sipil di tingkat desa/kelurahan.

- 2) Fasilitasi kepada desa/kelurahan terkait pemanfaatan data kependudukan meliputi implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pelayanan administrasi kependudukan di desa.

Selain menggunakan Indikator Kinerja Utama, diperlukan indikator-indikator lain yang diperlukan untuk mengukur pencapaian kinerja perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa untuk urusan Administrasi Kependudukan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan adalah outcome. Adapun indikator dan capaian IKK Outcome Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 berdasarkan LPPD adalah sebagai berikut:

1. Persentase perekaman KTP elektronik dengan capaian 99,13%.
2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan capaian 61,34%.
3. Persentase kepemilikan akta kelahiran dengan capaian 99%.
4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan capaian 85,19%.

Sebagai instansi pelaksana urusan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten/kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi juga mendukung pencapaian target nasional yang ada pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pencapaian target tersebut selanjutnya dituangkan dalam sasaran kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan KTP-El, akta pencatatan sipil, dan KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP elektronik dan data kependudukan kepada lembaga pengguna, penerapan buku pokok pemakaman, dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan indikator serta capaian sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP elektronik	99,4%	99,13%	99,73%
Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	98%	99,02%	101,04%
Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	50%	61%	122%
Perjanjian kerjasama pemanfaatan KIA dengan mitra	3 Mitra	6 Mitra	150%
Perjanjian kerjasama pemanfaatan data	15 OPD	24 OPD	160%
Akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	15 OPD	24 OPD	160%
Buku Pokok Pemakaman	75%	100%	133%
Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	25%	3%	12%
Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	Tidak ada pungutan	Tidak ada pungutan	100%
Kepatuhan terhadap Permendagri No. 60 Tahun 2021	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada pelanggaran	100%
Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan administrasi kependudukan	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada pelanggaran	100%

2. Capaian keluaran/output kinerja pelayanan dokumen lainnya

Indikator: Keluaran/output hasil pelayanan dokumen lainnya dengan tingkat capaian 100%

Sepanjang tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi melayani permohonan masyarakat dengan output sesuai target kinerja dari Dirjen Dukcapil berupa 24 dokumen antara lain KTP-el, KK, KIA, Akta kelahiran, Akta

kematian, Akta perkawinan, Akta perceraian, berbagai macam surat keterangan, dan dokumen lain sesuai dengan Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Sedangkan layanan data pribadi sesuai aturan hanya bisa diberikan kepada yang bersangkutan atau keluarga yang ada di KK yang sama. Untuk data agregat telah diterbitkan 2 kali yaitu Data Agregat Kependudukan Semester 1 dan Semester 2.

3. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Indikator: Inovasi pelayanan terintegrasi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan PIAK serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dengan capaian 50% dimana target terdapat 2 inovasi dan terealisasi 1 inovasi.

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi meluncurkan 1 (satu) inovasi yaitu Paduka Dewi. Paduka dewi merupakan pelayanan administrasi kependudukan desa se-Kabupaten Ngawi yang dapat melayani dokumen Kartu Keluarga, Akta Pencatatan Sipil sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen administrasi kependudukan cukup dari desa setempat.

4. Laporan barang milik negara (BMN) Dukcapil di daerah

Indikator: Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di kabupaten/kota dengan tingkat capaian 100% dimana target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik negara (BMN) khususnya peralatan pencetakan KTP elektronik beserta pendukungnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi telah melakukan pelaporan secara tepat waktu kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

5. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian.

Penyajian data kependudukan memiliki banyak kepentingan dan manfaat yang penting, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Data Kependudukan yang disajikan sesuai regulasi adalah data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil sehingga akan ada standar yang sama dalam penyajian data secara nasional.

Dalam target kinerja sasaran tersebut, penyajian data kependudukan diwujudkan dalam bentuk Penyusunan buku profil kependudukan. Buku Profil Kependudukan berisi gambaran umum daerah dan data kuantitatif yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen kependudukan. Tingkat realisasi untuk penyusunan buku profil kependudukan ini adalah sebesar 100% dimana target dan realisasi 1 buku profil yang tersusun.

6. Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan.

Indikator: Terlaksananya pelayanan tingkat desa dengan tingkat capaian 100%.

Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi telah berhasil menyelenggarakan pelayanan sebagian urusan Adminduk di seluruh desa yaitu 213 desa dan 4 kelurahan yang ada di Kabupaten Ngawi, sehingga memberikan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di kabupaten ngawi.

7. Penerapan Zona Integritas (ZI)

Indikator: Terlaksananya pencaanangan zona integritas dengan tingkat capaian 100% dimana target dan realisasi 1 laporan.

Zona integritas merupakan pendekatan yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, efektif, dan berintegritas di dalam pemerintahan dan

lembaga publik. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memulai penancangan dan pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2022 dan terus berusaha meningkatkan kualitasnya agar dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB.

Berdasarkan sasaran dari perjanjian kinerja yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tersebut secara umum sasaran tersebut telah terakomodasi di dalam Renstra meliputi sasaran, program dan kegiatan, sehingga pencapaian kinerja program, kegiatan yang dilakukan akan mendukung pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dimaksud. Pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tersebut secara umum sudah memenuhi target dan dapat mendukung terlaksananya kebijakan nasional.

Meskipun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi secara keseluruhan sudah melebihi target yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dialami, diantaranya:

1. Belum meratanya kualitas SDM/petugas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kurangnya dukungan pemerintah desa dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan di tingkat desa.
3. Belum optimalnya pelayanan jemput bola dan perekaman massal di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) karena kesadaran siswa untuk melakukan perekaman KTP elektronik masih kurang.
4. Belum optimalnya penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam hal pemanfaatan pada layanan lintas sektoral.

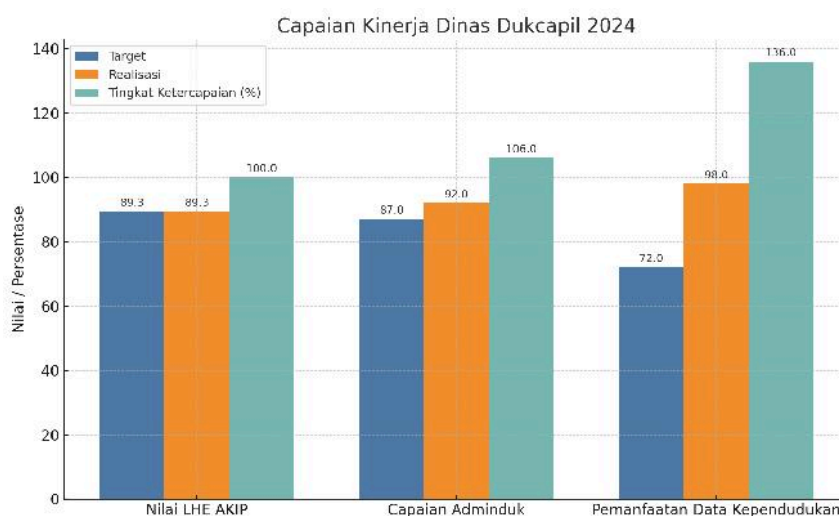
Adapun sebagai solusi dari hambatan atau kendala yang dialami serta upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan bimbingan teknis terkait regulasi administrasi kependudukan serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima.
2. Mendorong pemerintah desa melalui kolaborasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.
3. Optimalisasi pengimplementasian kebijakan dari direktorat jenderal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.
4. Kolaborasi aktif dengan dinas pendidikan dan sekolah untuk meningkatkan capaian kepemilikan KIA bagi anak usia 1-17 tahun kurang 1 hari serta perekaman KTP elektronik di tingkat SMA.
5. Optimalisasi jalur undangan bagi masyarakat yang memasuki usia wajib KTP.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana pada analisis kinerja pelayanan dapat dikatakan baik karena telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama dapat dilihat pada grafik berikut :



2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang mempengaruhi optimalisasi capaian program, yaitu:

1. Rendahnya kesadaran pada kelompok masyarakat tertentu untuk melaporkan atau segera mengurus perubahan dokumen administrasi kependudukan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan pentingnya dokumen kependudukan sebagai dasar untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya (pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dll).
3. Minimnya keterlibatan organisasi masyarakat/kelompok komunitas dalam upaya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya administrasi kependudukan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan adminduk di tingkat desa, yang ditandai dengan belum semua desa aktif menyelenggarakan layanan tersebut.
5. Kualitas sumber daya manusia (SDM) operator pelayanan yang belum merata, baik dari sisi kompetensi teknis maupun penguasaan sistem informasi.
6. Belum terkelolanya mekanisme pendaftaran informasi kependudukan secara terintegrasi, yang menyebabkan pemutakhiran data belum berjalan optimal.
7. Kurangnya kelengkapan data lintas sektoral dalam penyusunan profil kependudukan.
8. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum mencapai target nasional yang ditetapkan, menunjukkan masih adanya kendala teknis dan non-teknis dalam implementasinya.

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati serta Capaian Program Nasional

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang oleh perangkat daerah memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan visi dan

misinya Kepala Daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.

Secara nasional, pelaksanaan program pelayanan adminduk juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bagian dari perlindungan hak sipil anak, serta percepatan perekaman KTP-el bagi penduduk usia wajib KTP, termasuk kelompok rentan dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Upaya ini mendukung arah kebijakan nasional dalam memperluas akses terhadap identitas kependudukan sebagai dasar pelayanan publik.

Lebih jauh, capaian-capaian tersebut tidak hanya mencerminkan peningkatan kinerja daerah tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam astacita, yaitu delapan agenda pembangunan yang menjadi dasar perencanaan nasional. Adapun keterkaitan capaian program dengan program prioritas presiden yaitu:

1. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi, melalui pelayanan administrasi kependudukan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Penguatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, dengan pelayanan yang inklusif dan ramah kelompok rentan.
3. Penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting, dengan pemanfaatan data kependudukan untuk memastikan intervensi program sosial, kesehatan, dan pemenuhan gizi tepat sasaran.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang merupakan tantangan yang harus diselesaikan, maka peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi adalah:

1. Pengembangan jaringan aplikasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil/Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara menyeluruh di tingkat desa/kelurahan.

2. Peningkatan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan/melaporkan peristiwa kependudukan dengan melibatkan peran serta sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi.

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahunan yang Direncanakan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, terdapat beberapa isu strategis yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik melalui digitalisasi proses administrasi dan layanan publik;
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan menjamin kepastian hukum/hak sipil penduduk di Kabupaten Ngawi;
3. Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas birokrasi yang bersih menuju birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.
5. Pemanfaatan media teknologi informasi yang semakin maju yang memungkinkan terjadinya peretasan data kependudukan;
6. Optimalisasi Pemanfaatan Data Kependudukan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral dalam rangka pemenuhan Data Lintas Sektor Dalam penyusunan Profil Kependudukan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan dokumen Rancangan Awal RKPD yang telah disusun. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mempertimbangkan capaian target Renstra, prioritas program pembangunan daerah, serta pagu indikatif yang tersedia.

Proses review meliputi penelaahan terhadap kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan, termasuk indikator kinerja, tolok ukur keberhasilan, dan alokasi anggaran masing-masing. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diketahui bahwa dalam Rancangan Awal RKPD tercantum 51 sub kegiatan. Namun setelah dilakukan analisis kebutuhan, jumlah tersebut mengalami penyesuaian menjadi 39 sub kegiatan. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan kebutuhan aktual dan ketersediaan anggaran.

Selain perubahan jumlah sub kegiatan, terdapat pula penyesuaian besaran anggaran pada sebagian besar sub kegiatan guna memastikan alokasi anggaran lebih proporsional dan efisien. Temuan-temuan ini menjadi dasar penyempurnaan dokumen RKPD agar lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Ngawi.

Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ngawi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.586.761.744,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.424.902.021,00				
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			15.586.761.744,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.424.902.021,00				
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	12.529.261.744,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	9.248.607.571,00			
2	12	01	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	61.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	16.508.000,00			
2	12	01	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	5.566.000,00
2	12	01	02.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.825.000,00
2	12	01	02.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	12	01	02.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.177.500,00
2	12	01	02.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.474.500,00
2	12	01	02.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	12	01	02.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	15.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.465.000,00
2	12	01	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	7.411.276.856,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	8.211.059.907,00	
2	12	01	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11050 Orang /bulan	7.403.776.856,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang /bulan	8.208.737.907,00

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ngawi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	01	02.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.322.000,00	
2	12	01	02.02	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	12	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100 %	460.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100 %	24.500.000,00	
2	12	01	02.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	165.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	24.500.000,00	
2	12	01	02.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	295.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	12	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100 %	1.985.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100 %	192.318.664,00	
2	12	01	02.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.249.000,00	
2	12	01	02.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.545.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60.124.664,00	
2	12	01	02.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.085.000,00	
2	12	01	02.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.285.000,00	
2	12	01	02.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	10.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	5.640.000,00	
2	12	01	02.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 Laporan	325.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	109.935.000,00	
2	12	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	1.576.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	141.244.000,00	
2	12	01	02.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	700.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	12	01	02.07	0005	Pengadaan Mebel	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	165.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	34.500.000,00	
2	12	01	02.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	441.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	106.744.000,00	

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ngawi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	01	02.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	270.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	12	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	715.984.888,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	515.977.000,00	
2	12	01	02.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	180.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	
2	12	01	02.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	270.984.888,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	196.337.000,00	
2	12	01	02.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	252.000.000,00	
2	12	01	02.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	190.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	65.640.000,00	
2	12	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100 %	320.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100 %	147.000.000,00	
2	12	01	02.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ngawi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ngawi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000,00	
2	12	01	02.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ngawi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ngawi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	36.000.000,00	
2	12	01	02.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Kab. Ngawi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit	60.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	12	01	02.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	70.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	35.000.000,00	
2	12	01	02.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	62.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	56.000.000,00	
2	12	01	02.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	50.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Ngawi	Persentase penduduk dengan dokumen kependudukan	96 %	2.005.000.000,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Ngawi	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	90%	746.003.450,00	

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ngawi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	02	02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Cakupan anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan dan sesuai dengan standart pelayanan Persentase aktifasi identitas kependudukan digital bagi penduduk wajib KTP	90 % 90 % 90 %	1.102.500.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Persentase penyelesaian pelayanan dokumen administrasi Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan dengan jangka waktu 1 x 24 jam Persentase persyaratan pelayanan pendaftaran penduduk yang disederhanakan	90% 5%	164.811.500,00		
2	12	02	02.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	4.600.000,00	
2	12	02	02.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	350 orang	52.500.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	12	02	02.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 Laporan	1.000.000.000,00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	160.211.500,00	
2	12	02	02.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	100%	370.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	12	02	02.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	60000 Dokumen	370.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	12	02	02.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Persentase Peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75 Persentase desa yang terfasilitasi oleh layanan adminduk	80 % 60 %	422.500.000,00	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Persentase Peserta sosialisasi Standar Pelayanan yang mendapatkan nilai minimal 75 Persentase peningkatan pengajuan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, dan KIA) Secara Mandiri Jumlah Ketersediaan Layanan Mobile (Keiling) Ketersediaan layanan di luar jam kerja reguler (termasuk pada akhir pekan atau hari libur) untuk memudahkan akses bagi masyarakat yang sibuk.	70% 5% 2 Layanan 2 Layanan	506.191.950,00		

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ngawi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	12	02	02.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	48 Dokumen	252.500.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	12	02	02.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	N/A	N/A	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	498.831.950,00		
2	12	02	02.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	170.000.000,00	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	7.360.000,00		
2	12	02	02.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Persentase Petugas operator pelayanan yang memenuhi nilai standar kompetensi Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan adminduk	90 %	110.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Persentase SDM operator pelayanan pendaftaran penduduk yang memenuhi nilai standar kompetensi	75 %	75.000.000,00		
2	12	02	02.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	110.000.000,00	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	75.000.000,00		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Ngawi	Persentase penduduk dengan akta pencatatan sipil	96 %	484.000.000,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Ngawi	Persentase penduduk dengan akta pencatatan sipil	100 %	182.392.000,00		
2	12	03	02.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Sesuai Dengan Standart Pelayanan Persentase capaian akta kelahiran usia 0-18 tahun Persentase capaian Penerbitan akta kematian	95 % 85 % 97 %	204.000.000,00	Pelayanan Pencatatan Sipil			95 % 97 % 85 %	88.582.000,00		
2	12	03	02.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	80.000.000,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	26.400.000,00		
2	12	03	02.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	9 Layanan	124.000.000,00	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan	62.182.000,00		
2	12	03	02.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase desa yang terfasilitasi oleh layanan adminduk Jumlah fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil Aktif	70 % 90 %	160.000.000,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase desa yang terfasilitasi oleh layanan adminduk Jumlah fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil Aktif	90 % 1 Buah	43.810.000,00		
2	12	03	02.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	160.000.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ngawi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	12	03	02.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	N/A	N/A	N/A	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	43.810.000,00	
2	12	03	02.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Peserta Bimtek yang mendapatkan nilai minimal 75	80 %	120.000.000,00		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Peserta Bimtek yang mendapatkan nilai minimal 75	80 %	50.000.000,00	
2	12	03	02.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	120.000.000,00		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	50.000.000,00	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Data dan informasi kependudukan yang valid	99%	428.500.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Data dan informasi kependudukan yang valid	90 %	126.588.000,00	
2	12	04	02.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dokumen kerjasama yang terselesaikan dan terlaksana oleh lembaga pengguna dalam setahun Persentase peningkatan akses masyarakat terhadap layanan adminduk di desa yang didasarkan pada pemanfaatan data kependudukan	100 % 75 %	210.000.000,00		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dokumen kerjasama yang terselesaikan dan terlaksana oleh lembaga pengguna dalam setahun Persentase peningkatan akses masyarakat terhadap layanan adminduk di desa yang didasarkan pada pemanfaatan data kependudukan	75 % 75 %	44.970.000,00	
2	12	04	02.01	0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20 Dokumen	120.000.000,00		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	39.075.000,00	
2	12	04	02.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	14 Laporan	90.000.000,00		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan	5.895.000,00	
2	12	04	02.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ASN Dukcapil	Persentase Desa yang telah terfasilitasi SIAK	100 %	168.500.000,00		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ASN Dukcapil	Persentase Desa yang telah terfasilitasi SIAK	100 %	75.968.000,00	
2	12	04	02.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	103.500.000,00		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	75.968.000,00	
2	12	04	02.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	65.000.000,00			N/A	N/A	N/A	N/A	
2	12	04	02.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Peserta Bimtek TIK yang mendapatkan nilai minimal 75	85 %	50.000.000,00		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Peserta Bimtek TIK yang mendapatkan nilai minimal 75	85 %	5.650.000,00	

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ngawi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	04	02.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 Laporan	50.000.000,00	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	5.650.000,00	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kelengkapan data profil	100 %	140.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kelengkapan data profil	100 %	121.311.000,00	
2	12	05	02.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain dalam setahun Persentase Pemenuhan Data Kependudukan Kabupaten/Kota dalam setahun secara digital	100 % 60 %	140.000.000,00	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain dalam setahun Persentase Pemenuhan Data Kependudukan Kabupaten/Kota dalam setahun secara digital	100 % 60 %	121.311.000,00	
2	12	05	02.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000,00	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	60.166.000,00	
2	12	05	02.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	90.000.000,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	61.145.000,00	
TOTAL															

2.5. Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Ngawi.

Musrenbang RKPD Kabupaten Ngawi tahun 2025 telah dilaksanakan untuk membahas program dan kegiatan yang dibutuhkan di Tahun 2026. Pelaksanaan musrenbang tersebut menggunakan 2 (dua) media forum yaitu:

1. Media forum diskusi secara langsung yang dihadiri oleh seluruh peserta Musrenbang
2. Media *video conference* yang dihadiri oleh peserta dari kantor peserta masing-masing serta siaran langsung yang dapat disaksikan oleh masyarakat.

Secara garis besar, tahapan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada penyusunan dokumen RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD yang memuat data usulan dari Perangkat Daerah (PD) yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Renja SKPD.
3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Ngawi. Musrenbang tingkat kabupaten ini dilaksanakan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap usulan prioritas rencana pembangunan dari hasil musrenbang kecamatan dan kabupaten

yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Selain itu, pada forum ini juga dibahas terkait usulan langsung dari masyarakat terkait pembangunan daerah.

4. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD yang merupakan hasil dari musrenbang Tingkat Kabupaten Ngawi. Rancangan akhir tersebut sudah mempunyai kode rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan Pagu Indikatif.

Dalam proses penelaahan usulan program dan kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mendapatkan usulan dari masyarakat. (Lihat Lampiran table 2.5)

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026
Kabupaten Ngawi

Nama OPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2026 mengacu pada berbagai kebijakan nasional yang bersifat regulatif dan strategis dalam bidang administrasi kependudukan. Dasar hukum utama yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa setiap penduduk memiliki hak atas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan non diskriminatif. Di samping itu, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) menjadi pedoman penting dalam mendorong transformasi pelayanan yang inklusif, akurat, dan berbasis digital. Berbagai regulasi teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga turut memperkuat arah kebijakan ini, antara lain melalui penyelenggaraan pelayanan daring, perlindungan data pribadi penduduk, serta pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan lintas sektor.

Salah satu bentuk konkret pelaksanaan kebijakan nasional tersebut adalah implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Implementasi SIAK tidak semata-mata terbatas pada pengawasan terhadap pengadaan blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen. Artinya, sistem ini harus mudah dipahami oleh masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjalankan fungsi perlindungan, pengakuan, dan pengesahan terhadap status kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami

oleh penduduk. Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari sistem ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki manfaat langsung (insentif/benefit) karena menjadi prasyarat penting dalam mengakses berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan perbankan.

Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi kependudukan berbasis SIAK merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pencapaian tujuan strategis perangkat daerah, yaitu: *“Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang bersih dan prima”* yang juga selaras dengan tujuan RPJMD Kabupaten Ngawi yaitu *“Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel berbasis e-government terintegrasi”*. Melalui penerapan sistem yang terdigitalisasi, terstandar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi organisasi, yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan menjadi dasar dalam penyusunan sasaran, program, dan kegiatan tahunan perangkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja, yaitu: *“Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang bersih dan prima”* dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

3.2.2. Sasaran

Sasaran dalam rencana kerja merupakan pernyataan terukur mengenai hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran, yang merupakan penjabaran operasional dari tujuan strategis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Dengan perumusan sasaran yang tepat, penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur, serta mendukung keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah secara berkala.

Penetapan sasaran rencana kerja juga harus mendukung pencapaian sasaran daerah. Sesuai dengan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dan sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi, maka dapat dirumuskan sasaran rencana kerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Bersih dan Terintegrasi.

Adapun indikator tujuan/sasaran dan target kinerja tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan yang bersih dan prima		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	96,50
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	98,73

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA 2026
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Bersih dan Terintegrasi	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	96,50
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	98,73
			Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan Aktif	75%
		Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	89,61

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2026 mempertimbangkan berbagai faktor strategis sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan. Beberapa faktor utama tersebut meliputi: pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam mendukung pelayanan publik yang inklusif dan berbasis teknologi informasi; serta berperan dalam program nasional yaitu upaya penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting dengan pemanfaatan data kependudukan yang akurat untuk memastikan intervensi program sosial, kesehatan, dan pemenuhan gizi tepat sasaran.

Perencanaan juga berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029 dan mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ngawi. Dalam hal ini, Disdukcapil berkontribusi terhadap Misi Ketiga, yaitu *“Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik berbasis teknologi informasi”*, dengan tujuan *“Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel berbasis e-government terintegrasi.”* Berdasarkan misi dan tujuan tersebut, dirumuskan program prioritas di bidang kependudukan berupa *“Peningkatan Kemudahan Akses Layanan Administrasi Kependudukan Secara Gratis di Setiap Kecamatan.”*

Keterkaitan antara Renstra dan RPJMD tercermin dalam integrasi sistem layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital pelayanan publik. Isu strategis daerah yang relevan, yaitu *“Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik melalui digitalisasi proses administrasi dan layanan publik,”* memperkuat urgensi penyusunan program yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Di samping itu, perumusan program juga memperhatikan pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkelanjutan mengevaluasi pelaksanaan layanan dasar seperti perekaman

dan penerbitan KTP-el, KIA, akta kelahiran, dan akta kematian agar sesuai dengan ketentuan nasional dan kebutuhan masyarakat. Upaya pemenuhan standar waktu penyelesaian layanan, pelayanan administrasi kependudukan secara gratis, dan kemudahan akses terus ditingkatkan guna menjamin layanan yang efisien, akuntabel, dan terintegrasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi melaksanakan lima program yang berkaitan dengan administrasi kependudukan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kelima program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dijabarkan ke dalam 17 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang lebih rinci, masing-masing dilengkapi dengan indikator kinerja dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Sebagian besar sub kegiatan bersifat tersebar di seluruh kecamatan hingga desa, guna menjamin pemerataan akses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pula sub kegiatan yang bersifat terfokus, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan.

Adapun rencana pendanaan total kebutuhan dana sebesar Rp10.424.902.021,00 (sepuluh milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua puluh satu rupiah), dengan seluruh sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Ngawi melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Jika dibandingkan dengan Rancangan Awal RKPD, terdapat beberapa penyesuaian jumlah dan rincian sub kegiatan, serta perubahan pagu indikatif sebagai bentuk respons terhadap hasil analisis kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada Tahun 2026 beserta perkiraan maju untuk Rencana Tahun 2027.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Ngawi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.424.902.021,00				10.535.930.398,00
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.424.902.021,00				10.535.930.398,00
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi	100 %	9.248.607.571,00			100 %	9.059.429.773,00
2 12 01 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi	100 %	16.508.000,00			100 %	20.200.000,00
2 12 01 02.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	9 Dokumen	5.566.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		9 Dokumen	5.500.000,00
2 12 01 02.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ngawi	1 Dokumen	1.825.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	2.000.000,00
2 12 01 02.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Ngawi	2 Dokumen	5.177.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	3.500.000,00
2 12 01 02.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ngawi	2 Dokumen	2.474.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	4.000.000,00
2 12 01 02.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	7 Laporan	1.465.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Laporan	5.200.000,00
2 12 01 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi	100 %	8.211.059.907,00			100 %	8.253.000.000,00
2 12 01 02.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi	73 Orang /bulan	8.208.737.907,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		73 Orang /bulan	8.250.000.000,00
2 12 01 02.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi	1 Laporan	2.322.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	3.000.000,00
2 12 01 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	Kab. Ngawi	100 %	24.500.000,00			100 %	30.000.000,00
2 12 01 02.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ngawi	1 Paket	24.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	30.000.000,00

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Ngawi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 01 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi	100 %	192.318.664,00			100 %	170.300.000,00
2 12 01 02.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	1 Paket	3.249.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	5.000.000,00
2 12 01 02.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	2 Paket	60.124.664,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Paket	55.000.000,00
2 12 01 02.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	1 Paket	3.085.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Paket	6.800.000,00
2 12 01 02.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Ngawi	12 Paket	10.285.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Paket	17.000.000,00
2 12 01 02.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Ngawi	6 Laporan	5.640.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	6.500.000,00
2 12 01 02.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi	12 Laporan	109.935.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	80.000.000,00
2 12 01 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi	100 %	141.244.000,00			100 %	90.000.000,00
2 12 01 02.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Ngawi	10 Unit	34.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Paket	40.000.000,00
2 12 01 02.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi	6 Unit	106.744.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Unit	50.000.000,00
2 12 01 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi	100 %	515.977.000,00			100 %	383.929.773,00
2 12 01 02.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi	12 Laporan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	3.000.000,00
2 12 01 02.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Ngawi	36 Laporan	196.337.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		36 Laporan	195.929.773,00
2 12 01 02.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	48 Laporan	252.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		48 Laporan	120.000.000,00
2 12 01 02.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	84 Laporan	65.640.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		84 Laporan	65.000.000,00
2 12 01 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi	100 %	147.000.000,00			100 %	112.000.000,00

Tabel 4.1
 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026
 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
 Kabupaten Ngawi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 01 02.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Ngawi	1 Unit	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	22.000.000,00
2 12 01 02.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Ngawi	3 Unit	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Unit	40.000.000,00
2 12 01 02.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Ngawi	20 Unit	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		45 Unit	30.000.000,00
2 12 01 02.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi	1 Unit	56.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	20.000.000,00
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Kab. Ngawi	90 %				91 %	
		Persentase pengaduan masyarakat terkait layanan dan potensi KKN (pungli, dll) yang terselesaikan	Kab. Ngawi	100 %	746.003.450,00			100 %	890.000.625,00
2 12 02 02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelesaian pelayanan dokumen administrasi Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan dengan jangka waktu 1 x 24 jam	Kab. Ngawi	90 %				92%	
		Persentase persyaratan pelayanan pendaftaran penduduk yang disederhanakan	Kab. Ngawi	5 %	164.811.500,00			7%	215.000.000,00
2 12 02 02.01 0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Ngawi	1 Dokumen	4.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	30.000.000,00
2 12 02 02.01 0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	12 Laporan	160.211.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	185.000.000,00

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Ngawi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 02 02.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peserta sosialisasi Standar Pelayanan yang mendapatkan nilai minimal 75 Persentase peningkatan pengajuan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, dan KIA) Secara Mandiri Jumlah Ketersediaan Layanan Mobile (Keliling) Ketersediaan layanan di luar jam kerja reguler (termasuk pada akhir pekan atau hari libur) untuk memudahkan akses bagi masyarakat yang sibuk.	Kab. Ngawi	70 % 5 % 2 Layanan 2 Layanan	506.191.950,00			75 % 7 % 3 Layanan 2 Layanan	595.000.625,00
2 12 02 02.03 0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Kab. Ngawi	12 Laporan	498.831.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	560.000.625,00
2 12 02 02.03 0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	4 Laporan	7.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	35.000.000,00
2 12 02 02.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase SDM operator pelayanan pendaftaran penduduk yang memenuhi nilai standar kompetensi Persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diselesaikan tepat waktu Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Kab. Ngawi	75 % 100 % 100 %	75.000.000,00			80 % 100 % 100 %	80.000.000,00
2 12 02 02.04 0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Ngawi	1 Laporan	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	80.000.000,00
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk dengan akta pencatatan sipil	Kab. Ngawi	99,52 %	182.392.000,00			99,54 %	319.500.000,00
2 12 03 02.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penyelesaian pelayanan dokumen administrasi pencatatan sipil yang diterbitkan dengan jangka waktu 1 x 24 jam Persentase persyaratan pelayanan pencatatan sipil yang disederhanakan	Kab. Ngawi	90% 5%	88.582.000,00			92% 7%	92.000.000,00
2 12 03 02.01 0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Ngawi	12 Dokumen	26.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	12.000.000,00

Tabel 4.1
 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026
 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
 Kabupaten Ngawi

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 03 02.01 0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kab. Ngawi	4 Layanan	62.182.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Layanan	80.000.000,00
2 12 03 02.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Ketersediaan Layanan Mobile (Keliling) Ketersediaan layanan di luar jam kerja reguler (termasuk pada akhir pekan atau hari libur) untuk memudahkan akses bagi masyarakat yang sibuk	Kab. Ngawi	2 Layanan	43.810.000,00			3 Layanan	160.000.000,00
2 12 03 02.02 0006	Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi	12 Laporan	43.810.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	160.000.000,00
2 12 03 02.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase SDM operator pelayanan pencatatan sipil yang memenuhi nilai standar kompetensi	Kab. Ngawi	75 %	50.000.000,00			85 %	67.500.000,00
2 12 03 02.03 0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Ngawi	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	67.500.000,00
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data dan informasi kependudukan yang valid	Kab. Ngawi	99 %	126.588.000,00			99,10 %	198.500.000,00
2 12 04 02.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase dokumen kerjasama yang terselesaikan dan terlaksana oleh lembaga pengguna dalam setahun Persentase sosialisasi pemanfaatan data kependudukan yang terlaksana dalam satu tahun Persentase peningkatan akses masyarakat terhadap layanan adminduk di desa yang didasarkan pada pemanfaatan data kependudukan	Kab. Ngawi	100 % 100 % 5 %	44.970.000,00			100 % 100 % 6 %	42.000.000,00
2 12 04 02.01 0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Ngawi	3 Dokumen	39.075.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Dokumen	35.000.000,00
2 12 04 02.01 0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Ngawi	2 Laporan	5.895.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Laporan	7.000.000,00

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Ngawi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 04 02.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kecamatan dan desa yang terfasilitasi SIAK Persentase data kependudukan yang valid dalam setahun Persentase kesalahan input data pengajuan dokumen administrasi kependudukan dalam setahun	Kab. Ngawi	100 % 100 % 1,5 %	75.968.000,00			100 % 100 % 1,25 %	142.000.000,00
2 12 04 02.03 0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Ngawi	12 Laporan	75.968.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	142.000.000,00
2 12 04 02.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase SDM Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan yang memenuhi nilai standar kompetensi	Kab. Ngawi	75 %	5.650.000,00			80 %	14.500.000,00
2 12 04 02.04 0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Ngawi	1 Laporan	5.650.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	14.500.000,00
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Kab. Ngawi	100 %	121.311.000,00			100 %	68.500.000,00
2 12 05 02.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase pemenuhan data kependudukan bersih secara tepat waktu Persentase pemenuhan data lintas sektor dalam penyusunan profil kependudukan	Kab. Ngawi	100 % 100 %	121.311.000,00			100 % 100 %	68.500.000,00
2 12 05 02.01 0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	2 Dokumen	60.166.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Dokumen	5.500.000,00
2 12 05 02.01 0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Kab. Ngawi	2 Dokumen	61.145.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	63.000.000,00

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi disusun sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan perangkat daerah. Penyusunan Renja dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia, serta berlandaskan pada regulasi yang berlaku. Mengingat pentingnya peran administrasi kependudukan dalam menjamin kepastian status hukum warga negara serta penyediaan data dasar untuk berbagai pelayanan publik, maka penyusunan Renja Tahun 2026 harus dilakukan secara cermat dan terukur. Proses ini perlu didukung oleh kajian mendalam dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar mampu mengakomodasi dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan Renja harus mengacu pada norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, Renja harus berorientasi pada visi jangka panjang dengan capaian akhir yang terukur secara jelas. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran, maka dilakukan penyusunan skala prioritas penganggaran. Usulan penyesuaian atau penambahan anggaran dapat diajukan melalui mekanisme perubahan anggaran pada tahun berjalan, dengan tetap mengacu pada program prioritas daerah.

Penyusunan Renja Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029. Dengan ditetapkannya dokumen Renja ini, maka:

1. Renja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

2. Renja menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2026 serta laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tahun berjalan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Renja Tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi akan melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait arah kebijakan dan prioritas kegiatan. Selanjutnya, dilakukan penyusunan dokumen turunan seperti RKA dan DPA secara tepat waktu, disertai penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja. Dalam menghadapi dinamika kebutuhan, disiapkan mekanisme revisi anggaran yang sesuai ketentuan. Koordinasi lintas bidang dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting guna mendukung pelaksanaan program secara profesional, efektif, dan akuntabel.

Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan SDM pelayanan administrasi kependudukan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis, didukung oleh penguatan infrastruktur pelayanan. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata dan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, dan konsisten, guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui integrasi layanan berbasis teknologi informasi.

BUPATI NGAWI,

ONYAN HARSONO